



Rencana Strategis
DINAS PARIWISATA
PROVINSI GORONTALO
2023-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran dari RPD 2023-2026 yang mengacu pada RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025 setelah melewati proses penyusunan Ranwal, Rancangan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) dan beberapa kali mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam 1 tahun anggaran. Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gorontalo, Mei 2022
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Gorontalo

H. RIFLI M. KATILI, AP, S.Sos, M.Ec.Dev
NIP.197505201993111002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	42
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII: PENUTUP	52



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1** ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan
- Tabel 2.2** ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan (per 1 Januari 2022)
- Tabel 2.3** ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan Struktural (per 1 Januari 2022)
- Tabel 2.4** Persentase jumlah ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang telah mengikuti diklat struktural dan diklat fungsional
- Tabel 2.5** Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (2017-2021)
- Tabel 2.6** Potensi Wisata di Provinsi Gorontalo
- Tabel 2.8** Rata-rata lama tinggal tamu mancanegara dan nusantara Pada hotel/akomodasi lainnya di provinsi gorontalo Kurun waktu 2017-2021
- Tabel 2.9** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (T-C.23)
- Tabel 2.10** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (T-C.24)
- Tabel 3.1** Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)
- Tabel 3.2** Matriks Pencapaian RPJMD 2017-2022 Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
- Tabel 4.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25)
- Tabel 5.1** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T-C.26)
- Tabel 6.1** Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (T-C.27)
- Tabel 7.1** Indikator Sasaran Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (T-C.28)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan dapat memberikan kontribusi dan peran strategis melalui transformasi pembangunan ekonomi nasional pada lima tahun ke depan. Transformasi pembangunan ekonomi tersebut difokuskan pada peningkatan nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif nasional. Dalam upaya pencapaian pembangunan nasional target sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut tentunya diperlukan strategi serta terobosan dalam pelaksanaannya, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan bencana nonalam pandemi Virus Corona yang terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 diyakini menjadi titik balik perubahan tren pengembangan serta model bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Dunia pariwisata Indonesia pun wajib beradaptasi dengan kondisi new normal dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Pergeseran model bisnis dalam ekonomi kreatif dapat menjadi oportunitas dan peluang dalam kontribusi ekonomi kreatif yang lebih besar.

Untuk terus meningkatkan peran strategis dan kontribusi sektor Pariwisata ke depan, dan khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah dicanangkan, maka diperlukan arah kebijakan, strategi dan program yang taktis yang tanggap terhadap perkembangan kepariwisataan yang sangat dinamik dan melibatkan berbagai unsur terkait yang mendukung seperti kemajuan teknologi, dan berbagai paradigm pembangunan, sehingga seluruh unsur kepariwisataan dapat bergerak dan bersinergi menuju terwujudnya kepariwisataan Indonesia pada umumnya dan pengembangan pariwisata Gorontalo yang berdaya saing dan berkelanjutan pada khususnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor pariwisata selama kurun waktu 2023–2026. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berpedoman pada RPD Provinsi Gorontalo dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo, khususnya di sektor Pariwisata.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna



mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo adalah untuk menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun kurun waktu 2023-2026 ke dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjabarkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di sektor pariwisata.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan sektor pariwisata.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
4. Sebagai tolok ukur Perangkat Daerah dalam evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan program pembangunan pada kurun waktu tertentu.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :



- BAB I** Merupakan ***Bab Pendahuluan*** yang memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra seperti Latar Belakang perlunya penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan ***Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah*** yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan pada RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- BAB III** Merupakan ***Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah*** yang akan memuat permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah.
- BAB IV** Merupakan ***Bab Tujuan dan Sasaran***, Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V** Merupakan ***Bab Strategi dan Arah Kebijakan***, Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah selama lima tahun mendatang.
- BAB VI** Merupakan ***Bab Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan***, Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII** Merupakan ***Bab Penutup***



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mempunyai tugas di bidang Pariwisata dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
3. Pembinaan teknis di bidang pariwisata industri kecil dan menengah pariwisata lintas kabupaten/kota;
4. Pengumpulan bahan dan pengolahan data pariwisata dan industri kecil dan menengah pariwisata;
5. Pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan unsur-unsur lainnya dalam rangka pariwisata;
6. Penyusunan rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok;
7. Pelayanan ketatausahaan pariwisata;
8. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pariwisata;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Adapun tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah daerah dalam Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Membantu Gubernur/Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan bidang pariwisata;
- b. Mengkoordinasi seluruh program pariwisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, baik yang menyangkut tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan;
- c. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang pariwisata;



- d. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan usaha-usaha kepariwisataan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. Pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan dilingkup dinas.

Fungsinya adalah :

1. Menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
2. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
3. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
4. Menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
6. Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
7. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
8. Menatausahakan pengelolaan keuangan;
9. Menghimpun dan mengolah data keuangan;



10. Menyusun laporan keuangan SKPD;
 11. Menyusun laporan pertanggungjaawaban SKPD;
 12. Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain :
 - Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 13. Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
 14. Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
 15. Mengajukan SPM beserta kelengkapam dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 16. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
 17. Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
 18. Membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
 19. Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran per nomor kontrak;
 20. Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
 21. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 22. Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan mealporikan kepada BUD serta PA;
 23. Menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan lapoan keuangan;
 24. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
 25. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang berbasis kepegawaian aplikasi.
- Fungsinya adalah :
1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
 3. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
 4. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
 5. Mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;



6. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
7. Pengembangan kapasitas SDM aparatur;
8. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
9. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
10. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
11. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
12. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
13. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
14. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
15. Menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN dan SPT;
16. Menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
17. Menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
18. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
19. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
20. Melaksanakan tugas kehumasan;
21. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
22. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/PPD/Konsep Surat berdasarkan telaaham bidang-bidang), kearsipan dinas;
23. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. **Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata**

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata, serta standarisasi produk pariwisata

Fungsinya adalah :



- a. Penyusunan program kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi daya tarik wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
- g. Penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi produk pariwisata;
- h. Pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Destinasi;
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai tugasnya.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Mempunyai tugas meningkatkan pengembangan daya tarik wisata

Fungsinya adalah :

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan daya tarik wisata;
3. Fasilitasi pengembangan event kepariwisataan di Kabupaten/Kota;
4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata;
5. Penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi daya tarik wisata;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
7. Pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota, stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
8. Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

- b. Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan fasilitasi sarana prasarana pendukung daya tarik wisata.

Fungsinya adalah :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan kerja Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
3. Penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana daya tarik wisata;



4. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 5. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata;
 6. Penyiapan bahan penyusunan data investasi sarana dan prasarana daya tarik wisata;
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Seksi Industri Pariwisata
- Mempunyai tugas menyusun panduan, pembinaan, dan melaksanakan sosialisasi serta fasilitasi standarisasi produk usaha jasa pariwisata.
- Fungsinya antara lain :
1. Penyiapan perumusan kebijakaka industri usaha dan jasa pariwisata di Seksi Industri Pariwisata;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis satanrisasi produk;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dengan stakeholder produk usahan jasa pariwisata;
 4. Penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi produk usaha jasa pariwisata;
 5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha jasa pariwisata;
 6. Penyusunan panduan standarisasi produk usaha jasa pariwisata;
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Industri Pariwisata; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidan tugasnya.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koodinasi dan pemasaran pariwisata di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Fungsinya adalah :

- a. Penyusunan rencana program dan strategi pemasaran, pengembangan sarana promosi, pengembangan promosi dan pertunjukan serta informasi dan analisis data pemasaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;



- e. Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder pariwisata lainnya;
- g. Pengelolaan Pusat Infomasi, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat;
- h. Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengembangan dan memberikan rekomendasi pemasaran.

Fungsi antara lain :

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyiapan bahan kebijakan analisa pasar;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan analisa permintaan dan penawaran pasar potensial;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk brau;
6. Penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
7. Pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran pasar potensial, identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran, pemasaran produk baru;
8. Penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Promosi dan Pertunjukan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di Seksi Promosi dan Pertunjukan.

Fungsinya antara lain :

1. Penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan promosi dan pertunjukan;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;



4. Pelaksanaan travelexchange dan roadshow dalam dan luar negeri;
 5. Pelaksanaan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
 6. Pelaksanaan promosi melalui media;
 7. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholder pariwisata; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Seksi Informasi dan Analisis Data Pemasaran
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata untuk wisatawan dan masyarakat.
- Fungsinya antara lain :
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan perumusan kebijakan di Seksi Informasi dan Analisis Data Pemasaran;
 2. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan informasi pariwisata;
 3. Pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
 4. Penyelenggaraan Tourist Information Centre (TIC)/Tourist Information Service (TIS);
 5. Penyiapan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
 6. Pelaksanaan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisata

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pada pengembangan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Fungsinya adalah :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
- b. Melaksanakan dan mengembangkan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan di daerah;
- c. Melaksanakan sertifikasi pada insan kreatif sumberdaya manusia kepariwisataan;
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;



- e. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
- f. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi pengembangan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
- g. Menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisataan terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

Fungsinya antara lain :

1. Merumuskan, perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, desain, media, dan iptek;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, desain, media, dan iptek;
3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, desain, media, dan iptek;
4. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, desain, media, dan iptek;
5. Menyusun laporan secara berkala; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi pariwisata, kurikulum, pelatihan kepariwisataan, fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan.

Fungsinya antara lain :

1. Penyusunan rencana program dan penyiapan perumusan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan kelembagaan bidang kepariwisataan Provinsi Gorontalo;
3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;

5. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar stakeholder dengan luar daerah maupun luar negeri;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata
- Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Fungsinya antara lain :
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
 2. Pelaksanaan analisa potensi SDM bidang pariwisata;
 3. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan/kemampuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pariwisata;
 4. Menyiapkan materi bahan pembinaan/pelatihan SDM pariwisata;
 5. Menyiapkan bahan perumusan pedoman standar kompetensi bidang pariwisata;
 6. Fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi SDM pariwisata;
 7. Penyiapan bahan sertifikasi pembinaan dan uji kompetensi SDM pariwisata; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yaitu Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di jabat oleh 8 (delapan) orang dan Ahli Muda Perencana yang dijabat oleh 1 (satu) orang.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo sesuai lampiran Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo terdiri dari :

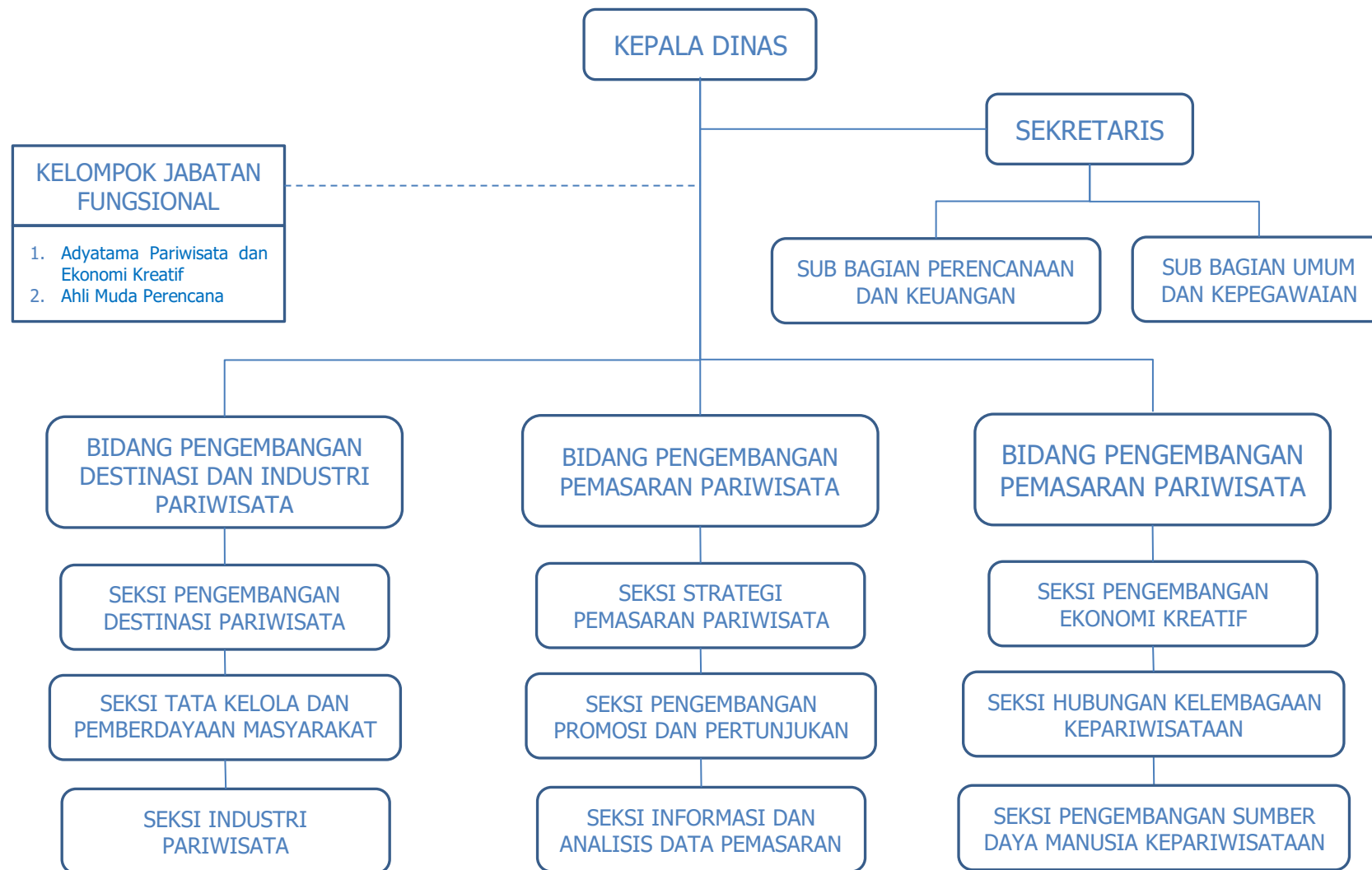
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Destinasi
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Industri Pariwisata
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata



- b. Seksi Pengembangan Promosi dan Pertunjukan
- c. Seksi Informasi dan Analisis Data Pemasaran
- 5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisatan
 - a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - b. Ahli Muda Perencana

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 59 (lima puluh enam) orang.
- Non ASN terdiri dari tenaga honor APBD sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, petugas keamanan 2 (dua) orang dan cleaning service 3 (tiga) orang.

Khusus untuk data ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan (per 1 Januari 2022)

No	Uraian	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	17	3	-	18
3.	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	2	9	2	-	12
4.	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3	7	-	-	12
5.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisata	2	10	1	-	11
	Jumlah	10	43	6	-	59

Dari total jumlah pegawai sebanyak 59 orang, terdapat pegawai laki-laki sebanyak 25 orang sedangkan pegawai wanita sebanyak 34 orang. Berdasarkan jabatan struktural, terdapat 1 orang eselon II, sementara dari 4 orang eselon III terdapat 3 orang laki-laki dan 1 orang wanita, sedangkan pejabat eselon IV sebanyak 1 orang, dan dari 9 pejabat fungsional terdapat 4 orang laki-laki dan 5 orang wanita.

Tabel 2.2 ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan (per 1 Januari 2022)

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	4	9	3	5	18
3.	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	-	2	6	2	3	12
4.	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	3	6	1	-	12
5.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisata	-	1	6	3	1	11
	Jumlah	-	14	27	9	9	59

Tabel 2.3 ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan Struktural (per 1 Januari 2022)

No	Uraian	Jabatan Struktural					Jumlah
		Ess.II	Ess.III	Ess.IV	JFT	Staf	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	1	16	18
3.	Bidang Pengembangan Destinasi dan	-	1	-	3	8	12

No	Uraian	Jabatan Struktural					Jumlah
		Ess.II	Ess.III	Ess.IV	JFT	Staf	
	Industri Pariwisata						
4.	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	1	-	2	9	12
5.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Kepariwisataaan	-	1	-	3	8	11
	Jumlah	1	4	1	9	44	59

Dalam pengembangan kompetensi SDM pada Dinas Pariwisata terdapat beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat, baik diklat struktural maupun diklat fungsional sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sampai tahun 2021 secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo telah mengikuti diklat structural, dan diklat fungsional sebesar 55.93% dari total 59 orang jumlah pegawai sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 2.4 Persentase jumlah ASN Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang telah mengikuti diklat struktural dan diklat fungsional

Uraian	Jumlah Pegawai	Diklat Struktural (Orang)	Diklat Teknis & Fungsional (Orang)	Persentase Jlh Pegawai yg Mengikuti Diklat Struktural (%)	Persentase Jlh Pegawai Mengikuti Diklat Teknis & Fungsional (%)
Ess.II	1	1	-	100	-
Ess. III	4	4	4	100	100
Ess.IV	1	1	1	100	100
JFT	9	9	-	100	100
Staf	44	44	21	100	47,78
Jumlah	59	59	33	100	55,93

2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana prasarana penunjang pekerjaan yang ada pada Dinas Pariwisata cukup memadai, terdiri dari sarana prasarana yang digunakan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan sarana prasarana yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (2017-2021)

No	Nama	Jumlah	Tahun Pembelian	Keterangan
1	Rak Kayu	1	2017	Penataan Tourist Center (Pusat Informasi Pariwisata) Rak Informasi
2	Rak Kayu	1	2017	Penataan Tourist Center (Pusat Informasi Pariwisata) Letter Sign
3	Peta	1	2017	Peta Destinasi Daerah Penataan Tourist Information Center (Pusat Informasi Pariwisata)
4	Alat Kantor Lainnya	1	2017	Anjungan Fingerprint
5	Kursi Besi/Metal	40	2017	Kursi Staf

6	Meja Resepsionis	1	2017	Penataan Tourist Information Center (Pusat Informasi Pariwisata)
7	A.C. Split	5	2017	
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2017	
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	2017	Meja Staf
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2017	
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	2017	
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2017	Penataan Tourist Information Center (Pusat Informasi Pariwisata) Kursi Front Office
13	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	2017	
14	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2017	
15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	2017	
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2017	
17	Layar Film/Projector	1	2017	
18	TV Monitor	1	2017	Penataan Tourist Information Center (Pusat Informasi Pariwisata)
19	Distiling Apparatus	2	2017	PC All In One
20	P.C Unit	6	2017	
21	Lap Top	6	2017	
22	Peralatan Mainframe Lainnya	1	2017	Finger Print, Unlimited User
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2017	
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2017	
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2017	
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2017	
27	Mesin Ketik Listrik	1	2018	Mesin Ketik Elektronik
28	Camera Video	1	2018	CAMERA DSLR
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2018	Vertikal Blinds-Gorden Jendela Kantor
30	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1	2018	Perlengkapan sound system (Keyboard, Power, Mixer, Speaker, Mic, Stand Mic, Stand Book, Stavolt, Wire)
31	TV Monitor	1	2018	
32	TV Monitor	1	2018	
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2018	
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2018	
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2018	
36	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	1	2019	
37	Kursi Rapat	74	2019	
38	Cable	1	2019	Kabel jamperantena ke Microtik
39	Peralatan Antena Penerima MF+HF	1	2019	
40	Peralatan Antena Pemancar MF+HF Portable	1	2019	Antena Indoor Mikrotik 9dbi
41	Lap Top	1	2019	
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2019	

43	Kabel UTP	1	2019	
44	Peralatan Jaringan lainnya	1	2019	
45	Peralatan Jaringan lainnya	1	2019	Mikrotik Inddor RB 433AH (3AP)
46	Pemadat Sampah	9	2020	Bak Sampah Kaki Roda
47	Pemadat Sampah	2	2020	
48	Lemari Kaca	1	2020	
49	Lemari Kaca	1	2020	
50	CCTV - Camera Control Television System	1	2020	
51	LCD Projector/Infocus	1	2020	
52	Papan Pengumuman	1	2020	Billboard ukuran 3 x 4 meter 2 (dua sisi) plus Lampu sorot
53	Kursi Besi/Metal	9	2020	Kursi Taman Minimalis
54	Kursi Kayu	12	2020	
55	Meja Kartu	2	2020	Set Meja Payung Outdoor
56	Meja 1/2 Biro	2	2020	
57	Meja Makan Besi	4	2020	
58	Sofa	1	2020	
59	A.C. Split	2	2020	
60	Kipas Angin	2	2020	
61	Kipas Angin	2	2020	
62	Unit Power Supply	1	2020	
63	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	2020	
64	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	2020	
65	Meja Tamu Biasa	1	2020	
66	Meja Operator	2	2020	
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	2020	
68	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I	2	2020	
69	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I	2	2020	
70	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I	1	2020	
71	Audio Tone Generator	1	2020	
72	Audio Tone Generator	2	2020	
73	TV Monitor	1	2020	
74	TV Monitor	1	2020	
75	TV Monitor	1	2020	
76	Meja Kerja	1	2020	
77	P.C Unit	1	2020	
78	Lap Top	1	2020	
79	Lap Top	2	2020	
80	Lap Top	1	2020	
81	Lap Top	1	2020	
82	Pompa Air	2	2021	
83	Station Wagon	1	2021	
84	Sepeda Motor	1	2021	

85	alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	2021	Pengadaan Thermo Scan Alat pengukur Suhu Tubuh
86	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	7	2021	Personal Komputer Berupa Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
87	Lemari Kayu	2	2021	Belanja Fasilitas Penunjang Glamping
88	Rak Kayu	2	2021	Belanja Fasilitas Penunjang Glamping
89	CCTV - Camera Control Television System	1	2021	
90	Kursi Besi/Metal	2	2021	Kursi Teras Belanja Fasilitas Penunjang Glamping
91	Kasur/Spring Bed	2	2021	
92	A.C. Split	2	2021	
93	Kipas Angin	2	2021	
94	Alat Pemanggang Roti/Sate	2	2021	Alat pemanggang Pengadaan Belanja Fasilitas Penunjang Glamping
95	Televisi	2	2021	Fasilitas Penunjang Glamping
96	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	2021	Tabung Pemadam Kebakaran
97	Alat Studio Lainnya	1	2021	
98	Antenna Tuning Unit	2	2021	Pengadaan Belanja Fasilitas Penunjang Glamping
99	P.C Unit	4	2021	
100	Komputer Unit Lainnya	5	2021	
101	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	2021	
102	Tenda	2	2021	Pengadaan Tenda Safari Glamping di OW Lombongo (2 Buah)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh kesiapan destinasi di Provinsi Gorontalo yang belum cukup, fasilitas penunjang obyek wisata yang belum memadai, kurangnya event-event pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, dengan adanya pandemic covid 19 yang melanda dunia, menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Tak luput juga Provinsi Gorontalo sebagai salah satu destinasi yang mengunggulkan obyek wisata alamnya mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang secara langsung mempengaruhi lama tinggal wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, dan diharapkan realisasi/capaian kerjanya dapat tercapai/terlampau. Kondisi Provinsi Gorontalo yang aman dan nyaman juga mempengaruhi aktifitas stakeholder pariwisata maupun masyarakat dapat berjalan baik dan lancar.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada Renstra 2017-2022 yaitu meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan Nusantara, yang didukung oleh 3 (tiga) indikator program yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah obyek wisata yang difasilitasi/ dikembangkan;
- b. Meningkatnya jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan;
- c. Meningkatnya persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tercapainya indikator program memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Selain itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Pencapaian indikator sasaran pada setiap tahunnya tidak mencapai target, yang apabila disandingkan dengan capaian indikator program yang secara keseluruhan telah mencapai target, sehingganya diperlukan analisa akan penetapan target pada Renstra serta strategi dan arah kebijakan lainnya, dimana perlu ditentukan target yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan SDM untuk menjalankan program tersebut, sehingga target yang ditetapkan lebih terukur.

Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata. Potensi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo tersebar di setiap kabupaten/kota. Adapun potensi wisata Provinsi Gorontalo dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) kategori, yaitu :

1. Wisata Pantai
2. Wisata Laut dan Pulau
3. Wisata Alam dan Pegunungan
4. Wisata Adat, Religi dan Situs Sejarah
5. Wisata Buatan

Sebaran potensi wisata di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6 Potensi Wisata di Provinsi Gorontalo

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan OPD)	(Di luar Kewenangan OPD)	
1. Gambaran Pelayanan OPD	<p>1. Potensi wisata di provinsi Gorontalo terdiri dari wisata pantai, wisata laut dan pulau, wisata alam dan pegunungan, wisata adat dan situs sejarah, dan wisata buatan</p> <p>a. Wisata Pantai</p> <p>Kota Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telapak Lahilote - Pantai Indah Pohe - Tangga Dua Ribu - Pantai Karang Citra - Pantai Tamendao - Pantai Blue Marlin - Pantai Indah Pohe <p>Kabupaten Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantai Biluhu Timur - Pantai Taulaa - Pantai Itoduti - Pantai Karang Putih - Pantai Dulanga - Pantai Tilalohe - Pantai Lending Paralayang <p>Kabupaten Boalemo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantai Bolihutuo - Pantai Pasir Panjang Olibuu - Pantai Langala Tabongo - Pantai keramat - Pantai Batu Buaya <p>Kabupaten Pohuwato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantai Libuo - Pantai Tanjung Maleo - Pantai Tanjung Bajo - Pantai pohon Cinta - Pantai Bulili - Pantai lalape <p>Kabupaten Bone Bolango :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantai Pinomontiga - Pantai Molutabu - Pantai Uabanga - Pantai Botutuonuo <p>Kabupaten Gorontalo Utara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantai Minanga - Pantai Monano - Pantai Milango - Pantai Tolitohuyo - Pantai Limu - Pantai Tolinggula - Pantai Botudidingga 	Representatif untuk menjadi destinasi wisata	Dinas Pariwisata Prov. Gorontalo membantu dalam mendorong penataan dan pengembangan obyek wisata serta dukungan event pariwisata di Kab/Kota	Kewenangan pengelolaan obyek wisata ada di Pemerintah Kabupaten/Kota	

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
	<p>b. Wisata Laut dan Pulau</p> <p>Kota Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada <p>Kabupaten Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada <p>Kabupaten Boalemo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulau Cinta Eco Resort - Teluk Bubaa - Pulau Limbatihu - Pulau Mohupomba Kiki - Pulau Mohupomba Da'a - Pulau Pasir Putih Botumoito - Pulau Monduli Bolihutuo - Pulau Asiangi Tilamuta - Pulau Paniki Tilamuta - Wisata Bawah Laut Dulupi (Pulau Kambing) <p>Kabupaten Pohuwato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanjung Maleo - Pulau Lahe - Pulau Olinggobe - Pulau Molumbunae <p>Kabupaten Bone Bolango :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Laut Olele - Wisata Hiu Paus Botubarani <p>Kabupaten Gorontalo Utara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Laut Raja & Popaya - Pulau Raja - Pulau Mas - Pulau Popaya - Pulau Seribu - Pulau Katilada - Pulau Mohinggito - Pulau Lampu - Pulau Diyonumo - Pulau Doko Kayu - Pulau Bohu - Pulau Bogisa Island <p>c. Wisata Alam dan Pegunungan</p> <p>Kota Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goa Baya Lo Milate <p>Kabupaten Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danau Limboto - Goa Ular - Taman Nasional Nantu - Hutan Pinus Motilango - Hutan Pinus Dulamayo Selatan - Bukit PPN Limboto <p>Kabupaten Boalemo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danau Teratai - Air Terjun Ayuhulalo - Air Terjun Tenilo - Air Panas Dulangeya - Suaka Marga Satwa Nantu <p>Kabupaten Pohuwato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danau Delo - Danau Telaga Popayato - Air Terjun Kelapa Lima - Air Terjun Makarti Jaya - Air Terjun Lomuli - Air Terjun Wanggarasi - Air Terjun Dengilo - Cagar Alam Panua - Pulau Karang <p>Kabupaten Bone Bolango :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Terjun Taludaa - Taman Nasional Bogani Nani Wartabone - Air Terjun Lombongo 1 dan 2 - Danau Perintis - Wisata River Tubing - Pemandian Air Panas Lombongo - Air Terjun Molutabu <p>Kabupaten Gorontalo Utara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agro Wisata Leboto - Arum Jeram Papualangi - Otalojin 				

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
	<p>d. Wisata Adat, Religi dan Situs Sejarah</p> <p>Kota Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Adat Dulohupa - Mesjid Hunto (Sultan Amai) - Mesjid Baiturrahim - Benteng Otanaha - Makam Keramat Ju Panggola - Makam Keramat Ta'Jailoyibuo - Makam Keramat Ta' Ilayabe - Makam Kramat Haji Bu'ulu - Makam Keramat Pulubunga - Makam Aulia Raja Ilato <p>Kabupaten Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Adat Bantayo Poboide - Wisata Religi Bubohu - Masjid Walima Emas - Taman Budaya Limboto - Meseum Pendaratan Soekarno <p>Kabupaten Boalemo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Wisata Kampung Bajo - Desa Wisata Tri Rukun Bongo 2 Wonosari <p>Kabupaten Pohuwato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Wisata Torosiaje - Mesjid Keramat Wanggarasi <p>Kabupaten Bone Bolango :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makam Knapert - Bulonggo Belanda - Benteng Leiden - Benteng orange <p>e. Wisata Buatan</p> <p>Kota Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemandian Bak Potanga - Kolam Renang Lahilote <p>Kabupaten Gorontalo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemandian Taluhu Barakati - Menara Keagungan Limboto - Pentadio Resort - Wisata Pendidikan Limboto Science Techno Park - Bukit Proja <p>Kabupaten Boalemo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada <p>Kabupaten Pohuwato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisata Lomuli - Wisata Dengilo - Wisata Taluduyunu <p>Kabupaten Bone Bolango :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebun Binatang Mana Suka <p>Kabupaten Gorontalo Utara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada 				

Berbagai potensi ini kemudian dipelihara, dikembangkan melalui kerjasama baik oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat. Perkembangan pariwisata apabila diukur dari pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan tren peningkatan capaian di tahun 2018 diukur dari jumlah kunjungan wisatawan yaitu sebesar 966.334 orang dari target yang telah ditetapkan sebesar 630.980 orang, dan dari target 662.528 orang di tahun 2019 tercatat sebanyak 1.315.429 orang ke Provinsi Gorontalo, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh wabah pandemi covid. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya peningkatan kualitas destinasi, pengembangan jejaring pemasaran, pemberdayaan industri pariwisata dan didukung oleh peningkatan kualitas SDM Pariwisata. Kondisi ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat baik secara nasional maupun internasional.

Jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di obyek wisata yang tersebar di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 Data kunjungan wisatawan di provinsi gorontalo
Kurun waktu 2017-2021

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Nusantara	
2017	2.542	313.286	315.828
2018	8.532	957.802	966.334
2019	11.173	1.304.256	1.315.429
2020	2.122	510.421	512.543
2021	65	484.580	484.645

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2021

Tabel 2.8 Rata-rata lama tinggal tamu mancanegara dan nusantara
Pada hotel/akomodasi lainnya di provinsi gorontalo
Kurun waktu 2017-2021

Tahun	Rata-rata lama tinggal/menginap (hari)		
	Tamu Mancanegara	Tamu Nusantara	Tamu Mancanegara dan Nusantara
2017	3.60	1.82	1.85
2018	2.21	1.71	1.72
2019	1.62	1.68	1.68
2020	1.48	1.41	1.58
2021	1.61	1.37	1.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Gorontalo tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo, hal ini mengindikasikan bahwa belum maksimalnya atraksi dan pertunjukan di destinasi wisata dan perlu adanya upaya untuk sehingga dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo.

Berbagai pencapaian kinerja tersebut tentunya didukung oleh keberhasilan pelaksanaan berbagai program kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo selama kurun waktu lima tahun. Pencapaian kinerja program kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo merupakan wujud upaya bersama secara berkelanjutan berbagai pihak berkepentingan untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo secara terus menerus. Faktor lain yang berpengaruh adalah meningkatnya sinergitas kegiatan promosi, peningkatan pemberdayaan industri pariwisata, peningkatan kualitas destinasi serta pengembangan SDM pariwisata ke arah yang lebih kompetitif. Faktor penting lainnya adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di lingkungan sekitarnya.

Untuk lebih jelasnya hasil pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo periode RPJMD 2017-2021 sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (T-C.23)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indikator Sasaran : Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara				2	2	2	3	3	1,85	1,72	1,68	1,58	1,32	92,50	86,00	84,00	52,67	44,00
1	Indikator Program : Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (T-C.24)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%		
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	1.217.501.500	971.892.468	1.357.038.500	776.461.602	-	1.129.376.074	922.281.857	1.307.689.849	715.372.805	-	0,93	0,95	0,96	0,92	-	1.080.723.518	1.058.692.161
Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	368.723.000	439.725.000	581.181.364	358.644.575	-	357.973.828	436.962.201	574.897.481	334.295.075	-	0,97	0,99	0,99	0,93	-	437.068.485	434.381.192
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.031.152.066	3.975.900.000	3.120.829.500	1.231.279.998	-	1.805.594.200	3.639.711.413	3.067.869.084	1.161.378.098	-	0,89	0,92	0,98	0,94	-	2.589.790.391	2.533.400.925
Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	1.750.565.000	1.023.606.499	765.000.000	2.373.216.500	-	1.597.911.169	963.808.319	761.487.150	2.355.246.300	-	0,91	0,94	1,00	0,99	-	1.478.097.000	1.439.933.542
Program Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah	1.252.330.000	-	-	-	-	1.219.001.950	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	313.082.500	304.750.488
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (DAK)	3.900.000.000	1.664.000.000	-	2.246.587.000	-	3.701.918.000	1.614.560.743	-	2.245.284.672	-	0,95	0,97	-	1,00	-	1.952.646.750	1.903.126.250
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata	-	670.376.518	600.000.000	207.379.000	-	-	659.073.100	597.487.559	196.802.800	-	-	-	1,00	0,95	-	369.438.880	369.438.880
Pemetaan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020																	
Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-	789.257.271	-	-	-	-	767.687.798	-	-	-	-	0,97	789.257.271	789.257.271
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	-	-	2.341.982.818	-	-	-	-	2.222.216.809	-	-	-	-	0,95	2.341.982.818	2.341.982.818
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	432.335.964	-	-	-	-	409.328.157	-	-	-	-	0,95	432.335.964	432.335.964
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	255.439.468	-	-	-	-	247.288.350	-	-	-	-	0,97	255.439.468	255.439.468
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	2.324.966.165	-	-	-	-	2.299.996.185	-	-	-	-	0,99	2.324.966.165	2.324.966.165
Belanja Langsung	10.520.271.566	8.745.500.485	6.424.049.364	7.193.568.675	6.143.981.686	9.811.775.221	8.236.397.633	6.309.431.123	7.008.379.750	5.946.517.299	5,62	4,77	4,93	5,74	4,83	14.364.829.209	14.187.705.122

Cat : Pada tahun 2021 nama program mengalami perubahan sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Jika melihat potret kebelakang selama 5 (lima) tahun perjalanan Provinsi Gorontalo terdapat beberapa keberhasilan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa juga terdapat beberapa permasalahan, tantangan dan peluang khususnya dibidang Pariwisata sebagai berikut :

a. Tantangan yang dihadapi dibidang pariwisata yaitu :

1. Belum optimalnya pelibatan dan peran masyarakat lokal sehingga potensi dan posisi masyarakat lokal sebagai pelaku/subyek penting dalam pengembangan pariwisata masih belum terwujud secara nyata dan optimal.
2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat pariwisata bagimasyarakat.
3. Belum kuatnya komitmen Sapta Pesona dikalangan masyarakat sehingga sadar wisata sebagai bentuk komitmen strategis dalam pengembangan pariwisata masih belum mengakar, dipahami, dan disikapi secara tepat dan konkret di kalangan masyarakat.
4. Dukungan dan peran pihak terkait (akademisi, bisnis, government, komuniti, dan media), belum optimal sehingga dalam pengembangan pariwisata masih relatif terbatas, belum kontinue, atau masih temporer (masih berdasarkan keberadaan suatu event).
5. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan kabupaten kota belum efektif sehingga upaya pengembangan belum terintegrasi.
6. Dukungan 3 A (aksesibilitas, amenitas dan atraksi) dalam pengembangan destinasi pariwisata belum mendapat perhatian.
7. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui BAS (branding, advertising dan selling) belum optimal.
8. Terbatasnya sumberdaya manusia di bidang pariwisata, sehingga mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan dan daya saing pariwisata

b. Adapun peluang khususnya dibidang Pariwisata sebagai berikut :

1. Sumber daya alam yang dimiliki menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan.
2. Kekayaan seni dan budaya Gorontalo yang beraneka ragam menjadi potensi untuk dijadikan promosi pariwisata.
3. Destinasi wisata unggulan yang sudah dikenal oleh wisatawan serta destinasi wisata potensial lainnya yang siap dikembangkan.
4. Kemajuan teknologi dan informasi yang siap dimanfaatkan dalam mendukung promosi pariwisata.
5. Sumber daya manusia yang siap diberdayakan
6. Dukungan anggaran yang dimiliki oleh setiap daerah Kab/Kota maupun lintas SKPD Provinsi yang cukup besar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa hal utama yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata.
 2. Minimnya aksesibilitas dan konektivitas ke destinasi wisata.
 3. Prasarana dan sarana/fasilitas pendukung kepariwisataan yang ada belum memenuhi standar.
 4. Belum diterapkannya standarisasi pengelolaan usaha pariwisata secara umum.
 5. Masih kurangnya usaha industri pariwisata yang tersertifikasi.
 6. Kurangnya pemahaman terhadap nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat dan wilayah setempat.
 7. Belum terwujudnya kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, nyaman, indah, ramah dan kenangan) di destinasi wisata.
 8. Kurangnya akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik.
 9. Belum tersedianya ruang kreatif pelaku ekraf, pelaku seni dan pertunjukan untuk mengekspresikan kreatifitasnya.
 10. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pasar produk kreatif.
 11. Belum dikelolanya ekonomi kreatif sebagai penggerak industri pariwisata secara optimal terutama pada destinasi-destinasi wisata di Gorontalo.
 12. Terbatasnya sumberdaya manusia bidang pariwisata baik hotel, restoran dan pemandu wisata yang berkompeten.
 13. Pelaku ekonomi kreatif yang belum tersertifikasi.
 14. Belum adanya studi pasar pariwisata yang lebih mendalam untuk mengetahui karakteristik wisatawan, pola perjalanan, serta preferensi wisatawan.
 15. Masih minimnya upaya pemasaran dan promosi daya tarik wisata yang tepat sasaran baik luar maupun dalam negeri.
 16. Minimnya pemanfaatan media sosial guna mempromosikan pariwisata Gorontalo
- Adapun identifikasi ini dapat dilihat pada tabel T-B.35 sebagaimana terlampir.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Destinasi wisata	Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen amenitas, atraksi, maupun aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata • Minimnya aksesibilitas dan konektivitas ke destinasi wisata • Prasarana dan sarana/fasilitas pendukung kepariwisataan yang ada belum memenuhi standar
2	Industri pariwisata	Kurangnya industri usaha pariwisata yang terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diterapkannya standarisasi pengelolaan usaha pariwisata secara umum • Masih kurangnya usaha industri pariwisata yang tersertifikasi
3	Masyarakat di sekitar destinasi wisata	Kurangnya pemahaman masyarakat di destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman terhadap nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat dan wilayah setempat • Belum terwujudnya kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, nyaman, indah, ramah dan kenangan) di destinasi wisata
4	Industri kreatif	Belum optimalnya pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik • Belum tersedianya ruang kreatif pelaku ekraf, pelaku seni dan pertunjukan untuk mengekspresikan kreatifitasnya • Minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pasar produk kreatif • Belum dikelolanya ekonomi kreatif sebagai penggerak industri pariwisata secara optimal terutama pada destinasi-destinasi wisata di Gorontalo
5	Sumber daya manusia pariwisata	Masih kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia bidang pariwisata baik hotel, restoran dan pemandu wisata yang berkompeten • Pelaku ekonomi kreatif yang belum tersertifikasi
6	Pasar dan Pemasaran	Strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya studi pasar pariwisata yang lebih mendalam untuk mengetahui karakteristik wisatawan, pola perjalanan, serta preferensi wisatawan • Masih minimnya upaya pemasaran dan promosi daya tarik wisata yang tepat sasaran baik luar maupun dalam negeri • Minimnya pemanfaatan media sosial guna mempromosikan pariwisata Gorontalo

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2023-2026 tidak memuat Visi Misi Kepala Daerah disebabkan masa jabatan yang berakhir di tahun 2022, dan secara serentak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan November 2024. Penentuan visi misi dalam dokumen Renstra didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi dan isu strategis aktual sebagaimana yang tertuang pada dokumen RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 memuat Visi: Gorontalo Maju Dan Mandiri, dengan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal;
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal;
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Selain itu, dalam perumusannya, dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2023-2026 memperhatikan penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Isu-isu Strategis daerah, dan masukan dari para pemangku kepentingan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Renstra Kementerian yang ditelaah yaitu Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

a. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024, yaitu : "Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2020-2024, maka beberapa hal yang bisa ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengembangan pariwisata di daerah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif, mempunyai kemungkinan mendapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada kemandirian ekonomi daerah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan mancanegara maupun nusantara yang

berkunjung ke Gorontalo belum begitu besar dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, hal ini terlihat dari rata-rata lama tamu (wisatawan) yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Gorontalo tidak mencapai 3 hari selama kurun waktu 2012-2016 (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017) dibandingkan Indonesia secara keseluruhan, maka hal ini tentunya tidak cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Gorontalo.

2. Dengan adanya sumber daya alam yang dimiliki dan kekayaan seni budaya daerah bisa dijadikan modal untuk mendukung pariwisata Gorontalo, oleh karena itu pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo untuk ke depannya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah serta komitmen yang kuat dari seluruh stake holder pariwisata, agar sektor pariwisata bisa menjadi penggerak buat sektor lainnya dalam menumbuhkan perekonomian di daerah.

b. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo

1. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2021

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pohuwato yang Religius, Kreatif, Maju Berprestasi dan Berdaya saing melalui optimalisasi peran pemuda, olahraga, kebudayaan serta Pariwisata”.

Misi :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan program, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif, berdaya saing, berwawasan lingkungan, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan olah raga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
4. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
5. Meningkatkan pengembangan destinasi dan promosi serta Kemitraan pariwisata daerah.

Isu Strategis :

1. Belum maksimalnya bidang Pariwisata sebagai primadona sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pada objek wisata
3. Belum maksimalnya promosi objek wisata Kabupaten Pohuwato ke dalam dan di luar negeri
4. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
5. Kurangnya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

2. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Boalemo 2023-2026

Visi :

“Boalemo yang Maju, Mandiri dan Religius”

Misi :

1. Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal, dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius.
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah.

Isu Strategis :

1. Pengembangan industri pariwisata yang belum maksimal.
2. Daya dukung destinasi pariwisata yang masih rendah.
3. Pemasaran pariwisata yang belum optimal.
4. Pola kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk.
5. Penguatan karakter kebangsaan pemajuan kebudayaan yang belum efektif

3. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Mandiri”.

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter
2. Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian
4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup
5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah.

Isu Strategis :

1. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain
2. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal
3. Masuknya pengaruh negatif kebudayaan asing yang berkembang dimasyarakat
4. Infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung
5. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelakukebudayaan dan pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan Budaya dan Pariwisata (BUDPAR)

4. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023

Visi :

“Ceria, Unggul dan Sejahtera di Poros Maritim Indonesia 2023”.

Misi :

1. Membangun SDM Ceria (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah) baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat.

2. Mengembangkan keunggulan positioning Gorontalo Utara di antara dua provinsi (Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah) serta perairan dunia, menjadi modal utama kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan.
3. Mengembangkan kehidupan beragama dan berbudaya secara produktif, harmonis, dan berkelanjutan.

Isu Strategis :

1. Belum Optimalnya Sinergitas Program Pembangunan Lintas Sektor
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata;
3. Pelestarian Budaya
4. Belum Optimalnya Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata dan kebudayaan
5. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan.
6. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur dan Masyarakat
7. Rendahnya Kualitas Destinasi (Daya Saing Destinasi)
8. Lemahnya Kelembagaan Pariwisata dan Industri Pariwisata
9. Iklim Investasi daerah yang tidak kondusif

5. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021

Visi :

"Terwujudnya Kabupaten Bone Bolango sebagai Destinasi Pariwisata Utama di Provinsi Gorontalo".

Misi :

Mengembangkan Potensi dan Destinasi Pariwisata yang berdaya Saing, berwawasan Lingkungan, dan Budaya

Isu Strategis :

Rendahnya kunjungan wisata dan kemitraan dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kab. Bone Bolango

6. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Visi :

"Mewujudkan Kota SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik)".

Misi :

Penguatan Kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Koperasi dan Pengembangan Sektor Perekonomian

Isu Strategis :

1. Masih rendahnya aksesibilitas menuju ke obyek wisata.
2. Masih kurangnya penanganan kemacetan lalu lintas di jalur pariwisata.
3. Masih terbatasnya obyek wisata yang sudah tertata.
4. Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pariwisata.

5. Masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan.
6. Masih rendahnya koordinasi dan persamaan persepsi diantara OPD.

c. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Untuk telaahan Renstra Dinas Pariwisata tahun 2017-2022 terdapat beberapa target RPJMD yang dicapai seperti terlampir pada Tabel Matriks Pencapaian RPJMD 2017-2022 Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo khusus urusan Pariwisata.

Tabel 3.2 Matriks Pencapaian RPJMD 2017-2022 Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Urusan Pariwisata

No.	Target RPJMD 2017-2022	Realisasi	Arah Pencapaian/ Penyelesaian 2017	Ket.
1	Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri :	Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sesuai dengan target akhir periode RPJMD 2017-2022 sebanyak 766.960 orang, dimana capaian sampai dengan bulan September tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sebanyak 484.645 orang sehingga target akhir RPJMD belum tercapai pada tahun 2022. Jumlah kunjungan wisatawan ini diperoleh dari 8 (delapan) obyek wisata unggulan yaitu Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Iluta, Torosiaje, Taman Laut Olele, Lombongo, Pulau Saronde dan Hutan Nantu, serta obyek wisata pendukung lainnya yaitu Bototonuo, Hius Paus, Monano dan Minanga	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 = 315.828 orang - Tahun 2018 = 966.334 orang - Tahun 2019 = 1.315.429 orang - Tahun 2020 = 512.543 orang - Tahun 2021 = 484.645 orang 		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan (wisnus dan wisman) :	Rata-rata lama tinggal wisatawan sesuai data dari BPS Provinsi Gorontalo tidak mengalami peningkatan yang signifikan sesuai target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dan kondisi yang diharapkan pada akhir RPJMD (2022) untuk kunjungan wisatawan yaitu 4 (empat) hari	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 = 1.85 orang - Tahun 2018 = 1.72 orang - Tahun 2019 = 1.68 orang - Tahun 2020 = 1.58 orang - Tahun 2021 = 1.32 orang 		
2	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata	Fasilitas penunjang obyek wisata :	Fasilitas penunjang Obyek wisata di 8 obyek wisata unggulan tersebut adalah Olele, Saronde, Pentadio resort, Benteng Otanaha, Hutan Nantu, Torosiaje, Lombongo dan 3 OW pendukung : Bototonuo, Monano, Minanga	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 = - - Tahun 2018 = 3 obyek wisata - Tahun 2019 = 3 obyek wisata - Tahun 2020 = 2 obyek wisata - Tahun 2021 = 3 obyek wisata 		
		Jumlah obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal	Obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat sudah memenuhi target akhir RPJMD yaitu 4 obyek wisata. Obyek wisata yang dimaksud yaitu OW Bototonuo, Monano, Olele, Minanga	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 = 1 obyek wisata - Tahun 2018 = 2 obyek wisata - Tahun 2019 = 3 obyek wisata - Tahun 2020 = 2 obyek wisata - Tahun 2021 = 3 obyek wisata 		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan

SKPD dalam 4 (empat) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengkomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta harapan penataan ruang Gorontalo 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Gorontalo adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berkelanjutan”.

Rencana Tata Ruang Wilayah menggambarkan rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, memberikan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewartakan perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Rencana Struktur Ruang

Pengembangan jaringan jalan kawasan khusus provinsi direncanakan pada jalan-jalan yang menghubungkan ke kawasan pariwisata unggulan, kawasan transmigrasi, dan kawasan pertanian. Adapun jaringan jalan kawasan khusus untuk akses kawasan pariwisata unggulan:

- a. Wisata Bahari (Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara)
- b. Wisata Bubohu (Kabupaten Gorontalo)
- c. Wisata Biluhu (Kabupaten Gorontalo)

Rencana Pola Ruang

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengembangan kawasan pariwisata di Gorontalo diarahkan kepada kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pariwisata unggulan provinsi.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terdiri dari:

- a. Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo)

- b. Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo)
- c. Benteng Otanaha (Kota Gorontalo)
- d. Pantai dan Taman Bawah Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango)
- e. Pantai Botutonuo (Kabupaten Bone Bolango)
- f. Pantai Botubarani (Kabupaten Bone Bolango)
- g. Pantai Karang Citra/ Blue Marline (Kota Gorontalo)

Sedangkan kawasan pariwisata unggulan provinsi terdiri dari:

- a. Benteng Otanaha (Kota Gorontalo)
- b. Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo)
- c. Kawasan Air Panas Lombongo (Kabupaten Bone Bolango)
- d. Pantai dan Taman Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango)
- e. Suaka Margasatwa Hutan Nantu (Kabupaten Boalemo)
- f. Desa Wisata Torosiaje (Kabupaten Pohuwato)
- g. Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo)
- h. Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara)

Adapun lokasi prioritas pariwisata provinsi terdiri dari :

- a. Benteng Otanaha (Kota Gorontalo)
- b. Obyek Wisata Lombongo (Kabupaten Bone Bolango)
- c. Hiu Paus Botubarani (Kabupaten Bone Bolango)
- d. Museum Pendaratan Soekarno/Iluta (Kabupaten Gorontalo)
- e. Wisata Religi Bubohu/Bongo (Kabupaten Gorontalo)
- f. Obyek Wisata Bolihutuo (Kabupaten Boalemo)
- g. Obyek Wisata Minanga (Kabupaten Gorontalo Utara)
- h. Obyek Wisata Torosiaje (Kabupaten Pohuwato).

Kawasan Wisata Perdesaan

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di wilayah perdesaan melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Gorontalo yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, dilakukan juga peningkatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based development*) serta kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan telaahan atas analisis gambaran pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan RENSTRA K/L, telaahan RENSTRA Kab/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah maka isu-isu strategis yang ditetapkan adalah :

1. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen amenities, atraksi, maupun aksesibilitas
2. Kurangnya industri usaha pariwisata yang terstandarisasi
3. Kurangnya pemahaman masyarakat di destinasi wisata
4. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif
5. Masih kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten
6. Strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024, maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan untuk melihat kondisi capaian di akhir periode Renstra serta menjadi acuan penjabaran dokumen rencana kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan Pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran

Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
2. Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan.

Secara Rinci tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan OPD tergambar dalam tabel T-C.25.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,5 %	3 %	3,5 %	3,9 %
		Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	6.500 orang	6.500 orang	6.500 orang	6.825 orang
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	650.000 perjalanan	650.000 perjalanan	650.000 perjalanan	682.500 perjalanan
				656.500 wisatawan mancanegara dan nusantara	656.500 wisatawan mancanegara dan nusantara	656.500 wisatawan mancanegara dan nusantara	689.325 wisatawan mancanegara dan nusantara
			Jumlah Lokasi Prioritas Yang Difasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai Sakip OPD	B	B	B	B
		Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan kebijakan menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo telah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan pada periode Rencana Strategis 2023-2026 sebagaimana tersaji pada tabel T-C.26 sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan T-C.26

VISI : Gorontalo Maju dan Mandiri			
Misi 1 : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian	Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark 2 Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di Lokasi Prioritas Pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje). 3 Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Pentadio Resort, Museum Pendaratan Soekarno, Benteng Otanaha, Pantai dan Taman Bawah Laut Olele, Pantai Botutonuo, Pantai Botubarani, Pantai Karang Citra/ Blue Marline) 4 Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di Kawasan Pariwisata Unggulan Provinsi (Benteng Otanaha, Museum Pendaratan Soekarno, Kawasan Air Panas Lombongo, Pantai dan Taman Laut Olele, Suaka Margasatwa Hutan Nantu, Desa Wisata Torosiaje, Pentadio Resort, Pulau Saronde)
		Pengembangan Industri Pariwisata Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan dan penerapan industri pariwisata halal di desa Bongo 2 Pengembangan Moslem Friendly Tourism di Gorontalo
		Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui media sosial, cetak dan Elektronik 2 Penyelenggaraan event dan MICE 3 Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata 4 Pengembangan produk wisata 5 Pengembangan data sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 6 Peningkatan usaha kreatif dan perluasan pasar produk kreatif dipasar ekspor maupun pasar domestik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kepegawaian, Kearsipan, Data Sektoral, dan Budaya Kerja Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas SDM aparatur 2 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah 3 Peningkatan kualitas dokumen keuangan perangkat daerah 4 Peningkatan sarana dan prasarana dan jasa perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2023-2026 sesuai target RPD Provinsi Gorontalo, disajikan pada Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2023		2024		2025		2026		Target	Ro			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian				Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata		2,5%		3%		3,5%		3,9%		3,9%		Dinas Pariwisata	Provinsi Gorontalo	
Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara		2 hari		2 hari		3 hari		3 hari		3 hari					
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara		6.500 orang		6.500 orang		6.500 orang		6.825 orang		6.825 orang					
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara		650.000 perjalanan		650.000 perjalanan		650.000 perjalanan		682.500 perjalanan		682.500 perjalanan					
			Jumlah Lokasi Prioritas Yang Difasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi		8 lokasi					
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH OBYEK WISATA YANG DIKEMBANGKAN		6 OBYEK WISATA	4.300.000.000	6 OBYEK WISATA	3.255.000.000	6 OBYEK WISATA	3.417.750.000	6 OBYEK WISATA	3.588.637.500	24 OBYEK WISATA	14.561.387.500		Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	
		3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		8 lokasi	1.500.000.000	8 lokasi	1.575.000.000	8 lokasi	1.653.750.000	8 lokasi	1.736.437.500	8 lokasi	6.465.187.500			
		3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		8 lokasi	1.500.000.000	8 lokasi	1.575.000.000	8 lokasi	1.653.750.000	8 lokasi	1.736.437.500	8 lokasi	6.465.187.500			
		3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		8 unit	500.000.000	8 unit	525.000.000	8 unit	551.250.000	8 unit	578.812.500	32 unit	2.155.062.500			
		3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		8 unit	500.000.000	8 unit	525.000.000	8 unit	551.250.000	8 unit	578.812.500	32 unit	2.155.062.500			
		3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		9 dokumen/ laporan	1.700.000.000	8 dokumen/ laporan	525.000.000	8 dokumen/ laporan	551.250.000	8 dokumen/ laporan	578.812.500	33 dokumen/ laporan	3.355.062.500			
	3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1 dokumen	1.200.000.000							1 dokumen	1.200.000.000				
	3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		8 laporan	500.000.000	8 laporan	525.000.000	8 laporan	551.250.000	8 laporan	578.812.500	32 laporan	2.155.062.500				
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Industri Pariwisata yang Tersertifikasi		31 laporan/ unit usaha	600.000.000	31 laporan/ unit usaha	630.000.000	31 laporan/ unit usaha	661.500.000	31 laporan/ unit usaha	694.575.000	124 laporan/ unit usaha	2.586.075.000				
	3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata		3 laporan	300.000.000	3 laporan	315.000.000	3 laporan	330.750.000	3 laporan	347.287.500	12 laporan	1.293.037.500				
	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		3 laporan	150.000.000	3 laporan	157.500.000	3 laporan	165.375.000	3 laporan	173.643.750	12 laporan	646.518.750				

3.26.02.1.04.05	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	25 unit usaha	150.000.000	25 unit usaha	157.500.000	25 unit usaha	165.375.000	25 unit usaha	173.643.750	100 unit usaha	646.518.750		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata	18 DOKUMEN/ LAPORAN	5.000.000.000	18 DOKUMEN/ LAPORAN	5.250.000.000	18 DOKUMEN/ LAPORAN	5.512.500.000	18 DOKUMEN/ LAPORAN	5.788.125.000	72 DOKUMEN/ LAPORAN	21.550.625.000	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata	18 dokumen/ laporan	5.000.000.000	18 dokumen/ laporan	5.250.000.000	18 dokumen/ laporan	5.512.500.000	18 dokumen/ laporan	5.788.125.000	72 dokumen/ laporan	21.550.625.000		
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	525.000.000	2 dokumen	551.250.000	2 dokumen	578.812.500	8 dokumen	2.155.062.500		
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 laporan	850.000.000	3 laporan	892.500.000	3 laporan	937.125.000	3 laporan	983.981.250	12 laporan	3.663.606.250		
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	1.500.000.000	4 dokumen	1.575.000.000	4 dokumen	1.653.750.000	4 dokumen	1.736.437.500	16 dokumen	6.465.187.500		
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 dokumen	1.400.000.000	5 dokumen	1.470.000.000	5 dokumen	1.543.500.000	5 dokumen	1.620.675.000	20 dokumen	6.034.175.000		
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 dokumen	750.000.000	4 dokumen	787.500.000	4 dokumen	826.875.000	4 dokumen	868.218.750	16 dokumen	3.232.593.750		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLUNDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	JUMLAH SUBSEKTOR INDUSTRI KREATIF YANG DIFASILITASI	6 SUBSEKTOR	1.125.000.000	6 SUBSEKTOR	656.250.000	6 SUBSEKTOR	689.062.500	6 SUBSEKTOR	723.515.625	6 SUBSEKTOR	3.193.828.125	Bidang Pengembangan Ekraf dan SDM Kepariwisata	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Zona Kreatif yang Dikembangkan	2 laporan	425.000.000	1 Laporan	131.250.000	1 Laporan	137.812.500	1 Laporan	144.703.125	5 laporan	838.765.625		
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 laporan	300.000.000							1 Laporan	300.000.000		
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	131.250.000	1 Laporan	137.812.500	1 Laporan	144.703.125	4 laporan	538.765.625		
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 dokumen/ laporan	700.000.000	4 dokumen/ laporan	525.000.000	4 dokumen/ laporan	551.250.000	4 dokumen/ laporan	578.812.500	17 dokumen/ laporan	2.355.062.500		
3.26.04.1.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah pengembangan riset ekonomi kreatif yang dikembangkan	1 Dokumen	200.000.000							1 Dokumen	200.000.000		
3.26.04.1.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	1 laporan	150.000.000	1 laporan	157.500.000	1 laporan	165.375.000	1 laporan	173.643.750	4 laporan	646.518.750		
3.26.04.1.02.06	Pemberian Insentif	Jumlah Pemberian Insentif yang diberikan	1 laporan	150.000.000	1 laporan	157.500.000	1 laporan	165.375.000	1 laporan	173.643.750	4 laporan	646.518.750		
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	157.500.000	1 dokumen	165.375.000	1 dokumen	173.643.750	4 dokumen	646.518.750		
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.500.000	1 dokumen	55.125.000	1 dokumen	57.881.250	4 dokumen	215.506.250		

		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	JUMLAH SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERKOMPETEN	176 ORANG/ LAPORAN	510.000.000	176 ORANG/ LAPORAN	535.500.000	175 ORANG/ LAPORAN	413.437.500	175 ORANG/ LAPORAN	434.109.375	702 ORANG/ LAPORAN	1.893.046.875	Bidang Pengembangan Ekraf dan SDM Kepariwisata	
		3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	125 orang	410.000.000	125 orang	430.500.000	125 orang	303.187.500	125 orang	318.346.875	500 orang	1.462.034.375		
		3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	75 orang	175.000.000	75 orang	183.750.000	75 orang	192.937.500	75 orang	202.584.375	300 orang	754.271.875		
		3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 orang	100.000.000	50 orang	105.000.000	50 orang	110.250.000	50 orang	115.762.500	200 orang	431.012.500		
		3.26.05.1.01.07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	1 laporan	135.000.000	1 laporan	141.750.000					2 laporan	276.750.000		
		3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, Bimtek dan orang yang tersertifikasi	50 orang	100.000.000	50 orang	105.000.000	50 orang	110.250.000	50 orang	115.762.500	200 orang	431.012.500		
		3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	100.000.000	50 Orang	105.000.000	50 Orang	110.250.000	50 Orang	115.762.500	200 orang	431.012.500		
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			Nilai SAKIP OPD	B		B		B		B		B	B	Dinas Pariwisata	Provinsi Gorontalo
			Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	100%		100%		100%		100%		100%			
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN, KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA APARATUR	100%	9.677.546.777	100%	13.953.336.705	100%	9.085.416.129	100%	9.224.099.524	100%	41.940.399.135	Bidang Sekretariat	
		3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	446.925.107	5 Dokumen	469.271.362	5 Dokumen	492.734.930	5 Dokumen	517.371.677	20 Dokumen	1.926.303.077		
		3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	446.925.107	5 Dokumen	469.271.362	5 Dokumen	492.734.930	5 Dokumen	517.371.677	20 Dokumen	1.926.303.077		
		3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.485.269.525	1 Laporan	6.493.945.590	1 Laporan	6.503.055.458	1 Laporan	6.512.620.820	4 Laporan	25.994.891.392		
		3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	6.311.748.227	58 Orang/Bulan	6.311.748.227	58 Orang/Bulan	6.311.748.227	58 Orang/Bulan	6.311.748.227	58 Orang/Bulan	25.246.992.908		
		3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	173.521.298	1 Laporan	182.197.363	1 Laporan	191.307.231	1 Laporan	200.872.593	4 Laporan	747.898.484		
		3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	36.752.100	10 Orang	38.589.705	10 Orang	40.519.190	10 Orang	42.545.150	40 Orang	158.406.145		
		3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	36.752.100	10 Orang	38.589.705	10 Orang	40.519.190	10 Orang	42.545.150	40 Orang	158.406.145		
		3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.850.000.000	12 Paket	6.050.000.000	12 Paket	1.102.500.000	12 Paket	1.157.625.000	48 Paket	10.160.125.000		
		3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.850.000.000	12 Paket	6.050.000.000	12 Paket	1.102.500.000	12 Paket	1.157.625.000	48 Paket	10.160.125.000		
		3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	858.600.045	1 Laporan	901.530.048	1 Laporan	946.606.550	1 Laporan	993.936.878	4 Laporan	3.700.673.521		
		3.26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	858.600.045	1 Laporan	901.530.048	1 Laporan	946.606.550	1 Laporan	993.936.878	4 Laporan	3.700.673.521		
		JUMLAH				20.612.546.777		23.650.086.705		19.118.166.129		19.758.487.024		83.139.286.635		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini akan dibahas Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel T-C.28, sebagaimana terlampir.

Tabel 7.1 Indikator Sasaran Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (T-C.28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Data s/d Tahun 2022)	2023	2024	2025	2026	
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara		2 hari	2 hari	3 hari	3 hari	3 hari
2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara		6.500 orang	6.500 orang	6.500 orang	6.825 orang	6.825 orang
			650.000 perjalanan	650.000 perjalanan	650.000 perjalanan	682.500 perjalanan	682.500 perjalanan
			656.500 wisatawan mancanegara dan nusantara	656.500 wisatawan mancanegara dan nusantara	656.500 wisatawan mancanegara dan nusantara	689.325 wisatawan mancanegara dan nusantara	689.325 wisatawan mancanegara dan nusantara
3	Jumlah Lokasi Prioritas Yang Difasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif	n/a	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi
4	Persentase Peningkatan Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Tahun 2023-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Dinas Pariwisata khususnya dan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Gorontalo, Mei 2022
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Gorontalo,



RIFLI M. KATILI, AP, S.Sos, M. Ec.Dev

NIP. 197505201993111002

Lampiran - Lampiran